



Katalog BPS : 9302002.51

*Jilid II Penggunaan*

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI 2009 – 2011**



<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**



Katalog BPS : 9302002.51

*Jilid II Penggunaan*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROVINSI BALI  
2009 – 2011**

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROVINSI BALI  
2009 – 2011**

**No. Publikasi : 51550.1204**  
**Katalog BPS : 9302002.51**  
**Ukuran Buku : 17,6 X 25 Cm**  
**Jumlah Halaman : 86 + x**

**Naskah :**

**Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**  
***Regional Accounts and Analysis Statistic Division***

**Diterbitkan Oleh :**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Bali**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA PENGANTAR



Sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab atas perstatistikan di Indonesia, termasuk perstatistikan di daerah. Karena itu, penyediaan data makro sebagai hasil dari kegiatan statistik merupakan tanggung jawab BPS sesuai tuntutan perundang-undangan. Dari sekian banyak data yang disajikan BPS di level nasional maupun daerah, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak.

Salah satunya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang penyajiannya terekam dalam sebuah buku atau publikasi. Publikasi PDRB Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 Jilid II Penggunaan ini merupakan publikasi rutin tahunan yang menyajikan beberapa indikator makro ekonomi di Provinsi Bali dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan perkembangan PDRB ditinjau dari sisi penggunaan/pengeluaran (*demand side*), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati begitu, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemakai data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

**Denpasar, Maret 2012**  
**Kepala Badan Pusat Statistik**  
**Provinsi Bali,**



**Ir. I Gde Suarsa, M.Si**  
**NIP. 195506281979031002**

<http://bali.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ~ i  
KATA PENGANTAR ~ iii  
DAFTAR ISI ~ v  
DAFTAR TABEL ~ vii  
DAFTAR GAMBAR ~ ix

## **BAB I** PENDAHULUAN

---

- 1.1. Fenomena Umum ~ 3
- 1.2. Maksud dan Tujuan ~ 6
- 1.3. Sumber Data ~ 7
- 1.4. Sistematika Penulisan ~ 8

## KONSEP DAN DEFINISI

---

## **BAB II**

- 2.1. Umum ~ 13
- 2.2. Konsep PDRB Menurut Komponen  
Penggunaan/Pengeluaran ~ 17

## **BAB III** RUANG LINGKUP, SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI

---

- 3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga ~ 37
- 3.2. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit ~ 41
- 3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ~ 42
- 3.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto ~ 43
- 3.5. Perubahan Stok/Inventori ~ 44
- 3.6. Ekspor - Impor Barang dan Jasa ~ 44

# **TINJAUAN EKONOMI PROVINSI BALI MENURUT PDRB PENGGUNAAN**

## **BAB IV**

- 4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit) ~ 53**
- 4.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ~ 60**
- 4.3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto ~ 64**
- 4.4. Ekspor - Impor Barang dan Jasa ~ 67**
- 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Penggunaan ~ 69**

## **BAB V**

## **PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

<http://bali.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1.** PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Masyarakat Tahun 2009 – 2011 (dalam juta rupiah) ~ **56**

**Tabel 4.2.** PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Masyarakat Tahun 2009 – 2011 (dalam juta rupiah) ~ **56**

**Tabel 4.3.** Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2009 – 2011 ~ **70**

<http://bali.bps.go.id>



<http://bali.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1.** Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2009 dan 2011 ~ **52**
- Gambar 4.2.** Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Masyarakat Tahun 2009 – 2011 (dalam persen) ~ **57**
- Gambar 4.3.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Pemerintah Tahun 2009 – 2011 ~ **63**
- Gambar 4.4.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Tahun 2009 – 2011 ~ **66**
- Gambar 4.5.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Ekspor Tahun 2009 – 2011 ~ **67**
- Gambar 4.6.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Impor Tahun 2009 – 2011 ~ **68**

<http://bali.bps.go.id>

# Bab I

## PENDAHULUAN

- Fenomena Umum
- Maksud dan Tujuan
- Sumber Data
- Sistematika Penulisan

<http://pali.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

## 1.1. Fenomena Umum

Kondisi perekonomian dunia yang semakin membaik tersebut telah berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Setelah tumbuh 6,10 persen di tahun 2010, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 6,46 persen pada tahun 2011. Hal tersebut dikarenakan kinerja perekonomian berangsur-angsur membaik sejalan dengan mulai berlalunya badai krisis finansial.

**“ ... Selama tahun 2011, realisasi pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,49 persen, terutama ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (13,79%), pembentukan modal tetap domestik bruto/investasi fisik (11,83%), dan impor (10,97%) ... ”**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,46 persen tersebut didukung oleh semua komponen, yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,7 persen, konsumsi pemerintah sebesar 3,2 persen, PMTB sebesar 8,8 persen, dan perubahan inventori sebesar 98,0 persen. Sedangkan komponen ekspor tumbuh sebesar 13,6 persen dan impor tumbuh sebesar 13,3 persen.

Pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, terutama di negara-negara *emerging countries*, dan terjaganya stabilitas perekonomian telah memberikan dampak positif bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan telah memberikan kontribusi bagi terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal dalam perekonomian domestik. Hal tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan berkualitas.

Bercermin dari apa yang terjadi dalam perekonomian dunia maupun skala nasional sepanjang tahun 2010 tersebut sudah tentu membawa implikasi terhadap perekonomian Bali. Pasca tumbuh 5,83 persen di tahun 2010, ekonomi Bali tercatat tumbuh 6,01 persen pada Triwulan I – 2011 (Y on Y), kemudian meningkat menjadi 6,42 persen pada Triwulan II – 2011. Pada Triwulan III – 2011, ekonomi Bali kembali meningkat menjadi 6,54 persen, dan terus meningkat pada Triwulan IV – 2011 menjadi 6,95 persen.

Alhasil, ekonomi Bali tumbuh 6,49 persen sepanjang tahun 2011. Kendati pertumbuhan ekonomi Bali dapat dicapai 6,49 persen selama tahun 2011 atau melewati dari angka target yang ditetapkan dalam KUA Bali 2011 sebesar 6,36 persen, dan laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 6,46 persen. Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,49 persen itu terutama ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,79 persen; pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB/investasi fisik) sebesar 11,83 persen; dan komponen penggunaan impor sebesar 10,97 persen. Dari keenam komponen dalam PDRB Penggunaan tahun 2011, hanya komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 7,57 persen dan 13,79 persen.

Karena itu, pembangunan ekonomi Bali perlu pula memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi wilayah maupun ekonomi dunia yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali ekonomi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis dan pro-rakyat, dengan tidak melupakan konsep Tri Hita Karana (THK), sebagai perwujudan dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Hal terpenting adalah bagaimana mengelola perekonomian Bali itu sendiri yang sangat tergantung dari sejauh mana ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi secara umum. Itulah sebabnya indikator makro menjadi sangat penting, termasuk indikator yang menggambarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi/usaha dalam suatu wilayah dan waktu tertentu yang dikenal dengan PDRB menurut lapangan usaha (*supply side*) atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir (PDRB menurut penggunaan/*demand side*).

Publikasi ini menyajikan data PDRB menurut komponen penggunaan/pengeluaran selama periode tahun 2009 – 2011, dan analisis deskriptif tentang PDRB menurut komponen penggunaan tersebut. Penyajian PDRB menurut komponen penggunaan dibedakan menjadi



PDRB atas dasar harga berlaku, dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB komponen penggunaan atas dasar harga berlaku menunjukkan jumlah pengeluaran dari komponen penggunaan pada tahun berjalan, sedangkan PDRB komponen penggunaan atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah pengeluaran dari komponen penggunaan dinilai dengan harga pada tahun dasar, di mana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

Komponen-komponen PDRB menurut penggunaan meliputi: (1) pengeluaran konsumsi rumahtangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba/ non profit; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTDB; (5) perubahan stok/inventori, dan (6) ekspor neto, yakni ekspor dikurangi impor. Jumlah pengeluaran semua komponen penggunaan tadi sama dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi atau PDRB sektoral menurut lapangan usaha.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Publikasi PDRB Provinsi Bali 2009 – 2011 Jilid II Penggunaan ini berisi data potensi ekonomi Provinsi Bali dilihat dari pendekatan komponen penggunaan atau pengeluaran, yang meliputi pengeluaran konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), perubahan stok/inventori, dan ekspor – impor barang dan jasa. Selain itu, disajikan pula analisis deskriptif yang secara ringkas menguraikan

perkembangan PDRB komponen penggunaan ekonomi Bali selama periode tahun 2009 – 2011.

### 1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil pengumpulan dan penghitungan data yang dilakukan oleh BPS. Sumber data tersebut antara lain. Pertama, sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan pengeluaran konsumsi rumahtangga antara lain bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Biaya Hidup (SBH). Kedua, sumber data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit diperoleh dari hasil survei khusus.

Ketiga, sumber data untuk pengeluaran konsumsi pemerintah digunakan berbagai macam data seperti data realisasi APBD Provinsi Bali, jumlah PNS, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, serta Indeks Harga Konsumen. Keempat, sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) adalah output bangunan dari sektor konstruksi; data usaha menengah besar (UMB), dan usaha mikro kecil (UMK) hasil Sensus Ekonomi 2006; survei lapangan; dan indeks implisit PMTDB.

Kelima, sumber data untuk pendekatan perubahan stok/inventori adalah data komoditi pertambangan dan penggalan dari publikasi statistik pertambangan dan

penggalan; data komoditas perkebunan; laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait; indeks harga implisit PDRB sektoral terpilih; dan IHPB terpilih, dan keenam, sumber data untuk ekspor-impor barang dan jasa didekati melalui beragam sumber seperti publikasi statistik ekspor dan impor barang dari BPS; pencatatan administrator pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara (bandara) maupun darat/terminal apabila memungkinkan; serta survei-survei khusus baik yang bersifat pengumpulan data primer maupun data sekunder.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, publikasi ini mencakup lima bab di mana masing-masing bab menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. ***Bab I Pendahuluan***. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum, maksud dan tujuan, serta sumber data dan sistematika penulisan.
2. ***Bab II Konsep dan Definisi***. Pada bab ini memuat tentang konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung PDRB Provinsi Bali menurut komponen penggunaan atau pengeluaran selama periode tahun 2009 – 2011.
3. ***Bab III Ruang Lingkup, Sumber Data dan Metode Estimasi***. Pada bagian ini menguraikan tentang sumber data yang digunakan dalam pengukuran PDRB menurut komponen penggunaan dan metode estimasi

yang digunakan untuk masing-masing komponen penggunaan.

4. **Bab IV Tinjauan Ekonomi Provinsi Bali Menurut PDRB Penggunaan.** Bab ini berisi analisis deskriptif mengenai perkembangan perekonomian Bali bila dilihat dari sisi PDRB menurut komponen penggunaan selama periode tahun 2009 – 2011.
5. **Bab V Penutup.** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penghitungan dan analisis deskriptif PDRB Provinsi Bali menurut komponen penggunaan selama periode tahun 2009 – 2011.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

# **Bab II**

## **KONSEP**

## **DAN DEFINISI**

- Umum**
- Konsep PDRB Menurut Komponen Penggunaan/Pengeluaran**

<http://bali.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

## 2.1. Umum

PDRB menurut komponen penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dapat dibedakan atas dua kategori utama, yakni menurut **pelaku ekonomi** dan menurut **jenis transaksi**.

“ ... PDRB dari sisi penggunaan lebih menjelaskan tentang bagaimana pendapatan yang diciptakan melalui proses ekonomi dari berbagai macam sektor produksi yang digunakan oleh berbagai institusi domestik (rumahtangga, lembaga swasta non profit, pemerintah, serta sektor produksi/produsen di wilayah domestik) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya ... “

Pelaku ekonomi terdiri atas rumahtangga (rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus didasarkan pada konsep residen); lembaga non profit pelayan rumahtangga (LNPR); pemerintah (pusat dan daerah); investor (pelaku investasi fisik); serta luar

daerah/wilayah dan luar negeri (eksportir dan importir), sedangkan jenis transaksinya digolongkan menurut pengeluaran untuk penggunaan berbagai produk sebagai konsumsi akhir serta untuk investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/PMTDB dan perubahan stok/inventori).

Selanjutnya pada transaksi eksternal perlu dibedakan dengan pihak mana transaksi tersebut dilakukan (domestik atau luar negeri). Pada umumnya transaksi ekspor dan impor (antar wilayah/negara) digolongkan hanya berdasarkan sifat dan jenis produk. Penggolongan menurut transaksi yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi dalam wilayah ini disebut sebagai pengeluaran atau penggunaan konsumsi akhir.



Disebut akhir karena tidak akan diproses produksi lebih lanjut dalam wilayah domestik. Komponen selain permintaan akhir adalah permintaan antara. Sementara itu untuk barang impor meskipun sebagian dari produknya untuk tujuan diproses lebih lanjut, tetapi diperlakukan berbeda. Sama halnya dengan ekspor, data impor hanya disajikan secara total.

Selanjutnya transaksi-transaksi tersebut yang akan menjadi dasar penggolongan PDRB menurut permintaan/penggunaan akhir ini --- dengan kata lain disebut sebagai pengeluaran konsumsi akhir --- dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Konsumsi akhir, terdiri dari komponen rumahtangga, lembaga non profit yang melayani rumahtangga, dan pemerintah.
2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
3. Perubahan inventori (persediaan)
4. Perdagangan antar wilayah:
  - 4.1. Keluar (domestik, *outflow*)
  - 4.2. Masuk (domestik, *inflow*)
5. Perdagangan antar negara:
  - 5.1. Ekspor (luar negeri, *outflow*)
  - 5.2. Impor (luar negeri, *inflow*)
6. Diskrepansi statistik, yakni perbedaan dengan hasil perhitungan PDRB dari pendekatan lain (umumnya sisi sektoral).

Dengan demikian, maka penggolongan tersebut merupakan kombinasi antara jenis transaksi, pelaku

transaksi, serta wilayah transaksi yang keseluruhannya dirinci sesuai dengan kepentingan analisis. Penilaian PDRB menurut pengeluaran/penggunaan umum dilakukan dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*), yang dengan kata lain disebut sebagai pendekatan tidak langsung (*indirect method*). Hingga kini, pendekatan dengan cara konvensional ini masih digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia karena dianggap sebagai cara yang relatif mudah, praktis dan efisien.

Pendekatan arus komoditi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap berbagai produk barang dan jasa (komoditas) baik yang berasal dari produk domestik maupun impor yang dikonsumsi oleh pelaku-pelaku ekonomi bersangkutan. Karena informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing segmen pelaku konsumsi akhir bersangkutan belum memadai (kelengkapan, akurasi dan kesinambungan) menyebabkan metode ini masih direkomendasikan sampai saat ini. Perlu ditambahkan bahwa sebagian besar data konsumsi akhir ini diperoleh dari hasil sistem pencatatan administrasi, kecuali untuk konsumsi rumahtangga yang diperoleh dari berbagai survei rumahtangga.

Penghitungan PDRB dari sisi **penggunaan** lebih menjelaskan tentang bagaimana pendapatan yang diciptakan melalui proses ekonomi dari berbagai macam sektor produksi yang digunakan oleh berbagai institusi domestik --- institusi yang dimaksud di sini adalah rumahtangga, lembaga non profit yang melayani

rumahtangga, pemerintah, serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik --- untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya.

Dengan kata lain, PDRB menurut komponen penggunaan ini menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah lain disebut sebagai pendekatan riil, yang juga sebagai **output akhir (final output)**. Hubungan antara sisi pendapatan dengan sisi pengeluaran atau penggunaan akhir berbagai produk barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk yang diekspor) dapat dinyatakan secara matematis dalam model **Keynesian** dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M$$

di mana :

- $C_h$  : Konsumsi rumahtangga
- $C_n$  : Konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit pelayan rumahtangga
- $C_g$  : Konsumsi pemerintah
- $I_i$  : Pembentukan modal tetap domestik bruto
- $I_s$  : Perubahan stok/inventori
- $X$  : Ekspor
- $M$  : Impor
- $Y$  : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$Y = C + I + X - M$$

di mana :

- C : Konsumsi rumahtangga, termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit, dan konsumsi pemerintahan.
- I : Investasi
- X : Ekspor
- M : Impor

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penyajiannya komponen-komponen PDRB menurut penggunaan adalah sebagai berikut:

- 1). Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
- 2). Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit pelayan rumahtangga
- 3). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- 4). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
- 5). Perubahan Stok/Inventori
- 6). Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor)

## **2.2. Konsep PDRB Menurut Komponen Penggunaan/Pengeluaran**

### **2.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga**

Pengeluaran konsumsi rumahtangga merupakan pengeluaran rumahtangga atas barang dan jasa untuk

tujuan konsumsi. Rumahtangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final consumer*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Rumahtangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu bangunan tempat tinggal. Mereka secara bersama mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang utamanya berupa kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup pengeluaran konsumsi rumahtangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikurangi hasil penjualan neto (penjualan dikurangi pembelian) barang bekas atau apkran pada periode waktu tertentu.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga meliputi seluruh pengeluaran konsumsi atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Penduduk suatu wilayah di sini dengan menggunakan konsep residen, yakni unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi (*centre of economic interest*) dalam batas ekonomi suatu daerah dan lama tinggal (*length of stay*) yang relatif panjang (satu tahun). Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu daerah dianggap sebagai sektor luar daerah/luar negeri/asing (*non resident*).

Sementara barang dan jasa yang dimaksud antara lain dalam bentuk:

1. Makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*).
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan dan tanaman hias.
5. Barang lain seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo dll), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dll), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, dan lain sebagainya.
6. Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dll), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dll), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga.
7. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
8. Pemberian/hadiah yang diterima dari pihak lain.
9. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di

luar negeri selain masuk sebagai konsumsi rumahtangga juga diperlakukan sebagai transaksi impor, sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan.

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali) seperti hasil karya seni dan barang antik (yang dihitung nilai marjinnya). Sekalipun barang tersebut sudah dinilai pada saat diproduksi, tetapi karena nilainya cenderung naik, maka umumnya dari waktu ke waktu harga barang tersebut relatif lebih mahal. Pembelian atas produk lama semacam ini diperlakukan sebagai investasi barang berharga. Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri adalah karena dalam hal ini rumahtangga pemilik dianggap menghasilkan jasa rumah bagi diri sendiri.

**Imputasi sewa rumah** adalah perkiraan nilai sewa atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut adalah milik sendiri. Apabila rumahtangga benar-benar menyewa rumah, maka yang diperhitungkannya adalah nilai sewa yang sebenarnya dibayar, baik dibayar secara penuh maupun tidak (karena mendapat subsidi).

Dalam komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga termasuk imputasi atas jasa layanan lembaga keuangan seperti bank, yang disebut sebagai FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*), atau dalam konsep SNA'68 disebut sebagai *imputed bank service charge (IBSC)*. Pengeluaran tersebut

berupa perkiraan nilai jasa layanan lembaga keuangan atas tabungan dan pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk transaksi bunga. Bunga diperlakukan sebagai pendapatan kepemilikan (*property income*), yang bukan terjadi dari proses produksi. Transaksi pembayaran maupun penerimaan bunga oleh rumahtangga tidak digolongkan sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai bagian dari transaksi penerimaan lain (*property income*).

Pengeluaran rumahtangga berupa barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal tidak termasuk pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga, contohnya pembelian barang untuk keperluan usaha, perbaikan besar dan pembelian rumah, dan lain sebagainya. Pengeluaran rumahtangga untuk keperluan transfer baik berupa uang atau barang tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga.

### **2.2.2. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit**

Pengeluaran lembaga swasta nirlaba (tidak mencari untung) adalah lembaga swasta yang dalam operasinya bertujuan tidak mencari keuntungan. Lembaga swasta nirlaba/tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat, seperti serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan formal maupun non formal, badan-badan kesehatan, palang merah,



rumah yatim piatu/panti asuhan, penyantunan orang cacat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang tidak mementingkan keuntungan.

Pengeluaran konsumsi lembaga ini meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, penerimaan transfer barang dan jasa, pembayaran upah gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto dikurangi dengan penjualan neto barang-barang bekas. Bila keuangan suatu lembaga dan pengawasan dikelola oleh pemerintah baik sepenuhnya atau sebagian besar, maka kegiatannya dimasukkan pada kegiatan pemerintah. Apabila lembaga ini melakukan kegiatan produksi seperti jasa kesehatan yang dirancang untuk memperoleh surplus usaha, maka pengeluaran yang termasuk lembaga swasta ini hanyalah kegiatan organisasi yang mengkoordinasi kegiatan yang hanya untuk menutupi biaya operasionalnya saja.

### **2.2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah).

Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non pasar pemerintah.

Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah:

1. Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Sebagai contoh, pencetakan publikasi, kartu pos dan reproduksi dari karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, dan lain sebagainya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga/departemen pemerintah tersebut, dan hasil penjualannya disebut **pendapatan dari barang yang dihasilkan**.
2. Kegiatan pemerintah yang menghasilkan jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut **pendapatan dari jasa yang diberikan**.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah meliputi:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, yakni pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dan lain sebagainya).
2. Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, yakni pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang dan jasa publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, R&D, dan lain sebagainya).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah juga mencakup pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang dan belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana. **Pengeluaran konsumsi pemerintah** (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (unit vertikalnya) di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa beserta perangkat dinasny pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

**Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah provinsi** mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan konsumsi pemerintah pusat yang menjadi

bagian dari konsumsi pemerintah daerah provinsi. Dengan menggunakan cara yang sama, **pengeluaran konsumsi pemerintah (kabupaten/kota)** mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, ditambah dengan konsumsi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### **2.2.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto**

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTDB dalam Sistem Neraca Nasional merupakan bagian dari pembentukan modal bruto. PMTDB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas.

Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomis belum diperhitungkan. Barang modal dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga penggolongan atau klasifikasi pokok, yakni: menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik (*holder*) dan

menurut institusi. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis barang modal, perilaku pemilikan/penguasaan barang modal serta institusi atau kelembagaan yang menguasainya, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

**1. PMTDB Menurut Jenis Barang, terdiri dari:**

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan peralatannya, kendaraan dan ternak.
- b. Perbaikan besar aset berwujud
- c. Biaya transfer kepemilikan aset

**2. PMTDB Menurut Sektor/Lapangan Usaha**

PMTDB menurut sektor/lapangan usaha adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor-sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor-sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tersier ini secara rinci terdiri atas sembilan lapangan usaha/sektor ekonomi, yakni: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan/konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8)

lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa.

Rincian PMTDB pada setiap lapangan usaha/sector ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pada sektor pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian, serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya.
2. Pada sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya; mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya; kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam memproduksi di sektor pertambangan.
3. Pada sektor industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti

gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya.

4. Pada sektor listrik, gas dan air bersih mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
5. Pada sektor bangunan/konstruksi adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi, termasuk di sini kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor bangunan/konstruksi.
6. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah semua barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha yang meliputi bangunan bukan tempat tinggal beserta peralatan produksi yang ada, alat-alat transpor dan mesin-mesin yang dipakai, termasuk juga asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya.
7. Pada sektor transportasi dan komunikasi. Modal adalah semua kendaraan yang

dioperasikan antara lain: bus, truk, dan lain-lain, alat-alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor-kantor perusahaan jawatan kereta api serta pembuatan jalan-jalan kereta api, dan stasiun-stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan.

8. Pada sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan beserta peralatan yang digunakan.
9. Pada sektor pemerintahan, terdiri dari barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedung-gedung/kantor-kantor pemerintahan, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi



pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-jalan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumbangan tersebut, misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperluas pabrik semen, maka semua pengeluaran baik untuk pembuatan bangunannya maupun untuk pembelian mesin-mesin adalah merupakan pembentukan modal di sektor industri pengolahan.

10. Pada sektor jasa-jasa, berupa gedung bioskop, ternak sirkus atau taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan lain sebagainya.

### **3. PMTDB Menurut Institusi**

Penggolongan ini menjelaskan tentang barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi (institusi) untuk digunakan dalam proses

produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Institusi di sini dibedakan menurut pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumahtangga) yang meliputi:

- a. Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk barang modal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa, pembuatan gedung atau bangunan kantor, perumahan dinas, bangunan sekolah, bangunan puskesmas, jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya.
- b. BUMN/BUMD, barang modalnya antara lain: lapangan terbang, pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, pesawat terbang dan lain sebagainya.
- c. Swasta dan rumahtangga, barang modal yang dikuasai dapat berupa bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain sebagainya.

### **2.2.5. Perubahan Stok/Inventori**

Bersamaan dengan saat terjadinya perubahan tahun dasar pada tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun dasar 2000, yakni pada Triwulan I tahun 2004, komponen perubahan stok/inventori mulai diperkenalkan. Komponen perubahan stok/inventori itu sendiri pengertiannya sama seperti perubahan stok yang sebelumnya digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDB/PDRB menurut penggunaan.

Stok/inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan stok/inventori adalah selisih antara nilai stok/inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai stok/inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan stok/ inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang stok/inventori yang bisa bermakna penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Pada prinsipnya stok/inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang stok/inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai *input antara* maupun *input akhir*. Klasifikasi stok/inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

- a. Barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta bangunan/konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yakni semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yakni barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan,

- termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yakni barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
  - e. Ternak untuk tujuan dipotong.
  - f. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
  - g. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
  - h. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

Karena data mengenai perubahan stok belum tersedia dengan lengkap, komponen ini dihitung sebagai residual (sisa) antara jumlah PDRB menurut lapangan usaha dengan jumlah komponen penggunaan permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, PMTDB dan ekspor neto. Dengan demikian, dalam penghitungan perubahan stok ini masih terkandung selisih statistik yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

### **2.2.6. Ekspor – Impor Barang dan Jasa**

Ekspor-impor barang dan jasa merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu daerah dengan daerah lain atau dengan penduduk negara lain.

Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, dan jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi barang di luar daerah. Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, sementara impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa. Pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai ekspor.

Begitu juga pembelian langsung barang dan jasa di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga f.o.b (*free on board*), sedangkan impor barang dinilai dengan harga c.i.f (*cost insurance and freight*). Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk. Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara, serta lembaga swasta tidak mencari untung yang berada di daerah tersebut.

# Bab III

## RUANG LINGKUP, SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI

- Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
- Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
- Perubahan Stok/Inventori
- Ekspor – Impor Barang dan Jasa



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

### 3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Perkiraan nilai konsumsi rumahtangga diperoleh berdasarkan hasil **Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)** Provinsi Bali. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi per kapita sebulan untuk

“ ... Sumber data dan metode estimasi yang disajikan dalam publikasi PDRB menurut komponen penggunaan ini tercover ke dalam kelompok pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga swasta nir laba/non profit, pemerintahan, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/PMTDB, perubahan stok/inventori, serta ekspor - Impor barang dan jasa ... “

kelompok bukan makanan. Sedangkan untuk harga setiap jenis barang yang dikonsumsi diperoleh rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Bali. Di samping itu, digunakan data penunjang lainnya seperti PDRB per kapita atas dasar

harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK), dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga terdiri dari:

#### A. Pengeluaran kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk:

- 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya



- 2). Makanan dan minuman jadi
- 3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau

**B. Pengeluaran kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk:**

- 1). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan
- 2). Aneka barang dan jasa
- 3). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala
- 4). Pajak dan asuransi
- 5). Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan lainnya seperti pengeluaran untuk keperluan pesta, upacara dan lain sebagainya

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Susenas dengan modul konsumsi dilakukan tiga tahun sekali. Dengan demikian, pengeluaran konsumsi rumahtangga selama setahun diperoleh dari pengeluaran per kapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sesuai dengan dilakukannya Susenas dengan modul konsumsi. Sedangkan perkiraan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk tahun-tahun berikutnya, dihitung berdasarkan metode sebagai berikut:

**3.1.1. Konsumsi Rumahtangga Kelompok Makanan**

Model yang digunakan untuk kelompok makanan adalah **fungsi eksponensial**. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan

pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola. Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

di mana:

$Q_i$  : Rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum)

$Y_i$  : Pendapatan per kapita sebulan

$a$  : Konstanta

$b$  : Koefisien elastisitas

$i$  : Kelompok pengeluaran ke- $i$  ( $i = 1, 2, \dots, 11$ )

Setelah dilakukan pengujian, koefisien elastisitas  $b$  digunakan untuk memperkirakan konsumsi per kapita tahun yang tidak ada data susenas yang menyangkut konsumsi rumahtangga. Dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan), konsumsi per kapita (data Susenas), maka konsumsi per kapita tahun berikutnya dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C_{n+1} = C_n + \{ (C_n) (dp) (b) \}$$

di mana:

$C_{n+1}$  : rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan pada tahun ( $n+1$ )

- $C_n$  : rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan pada tahun pelaksanaan Susenas modul konsumsi (n)
- dp : perubahan pendapatan per kapita harga konstan tahun ke-n dengan tahun ke n+1
- b : koefisien elastisitas

Untuk memperoleh nilai konsumsi atas dasar harga berlaku, konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumahtangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dengan harga eceran di pedesaan. Konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode revaluasi, artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tetap (tahun dasar).

### **3.1.2. Konsumsi Rumahtangga Kelompok Bukan Makanan**

Perkiraan konsumsi rumahtangga untuk kelompok bukan makanan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan terhadap pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Q_i = a + b \cdot Y_i$$

di mana:

$Q_i$  : Rata-rata konsumsi per kapita sebulan  
(kuantum)

$Y_i$  : Pendapatan per kapita sebulan

$a$  : Konstanta

$b$  : Koefisien elastisitas

$i$  : Kelompok pengeluaran ke- $i$  ( $i = 1, 2, \dots, 11$ )

Konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mendeflasi konsumsi per kapita (nilai data Susenas) dikalikan dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. IHK yang digunakan adalah indeks yang tahun dasarnya telah disesuaikan dengan tahun dasar deret PDRB.

Nilai konsumsi rumahtangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan total nilai konsumsi atas dasar harga konstan dengan IHK.

### **3.2. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit**

Penilaian terhadap barang dan jasa layanan (output) disetarakan dengan biaya yang dikeluarkan (input). Biaya yang dikeluarkan oleh lembaga terdiri dari

nilai penggunaan barang dan (konsumsi) antara dan nilai penggunaan faktor produksi, akan diperoleh penghitungan pengeluaran lembaga swasta yang tidak mencari untung atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk memperkirakan harga konstan digunakan metode deflasi dengan IHK sebagai deflator. IHK yang digunakan sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau dapat pula dilakukan cara ekstrapolasi, dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

### **3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Penghitungan konsumsi pemerintah dilakukan dengan menggunakan data keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa. Data tersebut diperoleh dari daftar survei keuangan Pemerintah Tingkat I ( $K_1$ ), Tingkat II ( $K_2$ ) dan Pemerintah desa ( $K_3$ ). Data keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Selain itu, digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Hankam (atas dasar harga berlaku) dan data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Dari daftar  $K_1$ ,  $K_2$

dan  $K_3$  diperoleh pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja rutin lainnya dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku. Perkiraan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk biaya pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri, sedangkan untuk belanja barang dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor.

### 3.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Penghitungan PMTDB dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: **Pertama**, berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal secara langsung oleh masing-masing lapangan usaha, dan **Kedua**, penghitungan pembentukan modal berdasarkan arus barang (*commodity flow*). Penghitungan PMTDB dengan metode langsung diperoleh dengan cara menghitung pembentukan modal di masing-masing sektor: (1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih; (5) Bangunan/Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-jasa. Sedangkan penghitungan PMTDB dengan

metode arus barang diperoleh dengan menghitung barang modal yang digunakan oleh masing-masing institusi pengguna barang modal tersebut.

### **3.5. Perubahan Stok/Inventori**

Data mengenai perubahan stok/inventori dalam komponen penggunaan PDRB ini masih merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral minus komponen akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto. Jadi di dalam perubahan stok tersebut, masih terkandung selisih statistik atau diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

### **3.6. Ekspor - Impor Barang dan Jasa**

Data ekspor dan impor untuk daerah Bali masih sangat terbatas dan sulit untuk memperolehnya karena kurangnya kelengkapan data yang tersedia. Ekspor dan impor barang pada dasarnya meliputi perpindahan barang ke luar wilayah provinsi baik ke luar negeri maupun daerah lainnya di luar wilayah provinsi Bali. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan BPS.

Sedangkan data ekspor impor antar pulau/provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat terbitan BPS, Administrator Pelabuhan (Adpel), Perum

Angkasa Pura, Jembatan Timbang dan survei khusus lainnya. Dari transaksi barang dan jasa tersebut baik dari luar negeri maupun antar pulau/provinsi akan diperoleh nilai atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang diperoleh dari Bulletin Ringkas BPS.

<http://bali.bps.go.id>





*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

# **Bab IV**

## **TINJAUAN EKONOMI PROVINSI BALI MENURUT PDRB PENGGUNAAN**

- Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga  
(termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit)**
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto**
- Ekspor – Impor Barang dan Jasa**
- Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen  
Penggunaan**



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

Di dalam ekonomi sebagai suatu kesatuan, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok (P.Saliem dan Ariningsih, 2008), yakni: (1) rumahtangga termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit; (2) pemerintah; (3) korporasi; (4) jasa keuangan; dan (5) kelompok luar daerah/luar negeri. Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi, di mana antar

**“ ... Anomali ekonomi Bali terlihat dari pergerakan sisi pengeluaran konsumsi masyarakat (konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba), di mana ketika ekonomi tertekan masyarakat melakukan pengereman konsumsi (*braking consumption*) ... ”**

daerah, satu institusi dengan yang lainnya dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, rumah tangga menyediakan sumber daya berupa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut dapat berupa tenaga kerja, tanah dan modal/kapital. Sebagai balas jasanya, rumahtangga menerima pembayaran dari korporasi berupa upah dan gaji, sewa, dan bunga serta keuntungan (profit dan deviden).

Berkebalikan dengan peran rumahtangga, korporasi mempekerjakan dan memberikan balas jasa atas faktor yang disediakan rumahtangga. Tugas korporasi adalah memproduksi barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh rumahtangga, pemerintah, korporasi lain dan pasar luar daerah/luar negeri. Korporasi juga memainkan peran vital dalam pembentukan investasi dalam pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan serta kapasitas produk lainnya.

Seperti halnya korporasi, pemerintah memainkan berbagai peran dalam perekonomian seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kegiatan lainnya. Kemudian pemerintah memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang juga merupakan bagian dari kelompok rumahtangga. Untuk memenuhi konsumsinya, pemerintah memerlukan barang dan jasa konsumsi akhir dari perusahaan.

Di bidang pembentukan modal, pemerintah juga mengeluarkan dana melalui pembangunan jalan baru, bangunan untuk sarana umum seperti rumah sakit, sekolah yang pada akhirnya pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi langsung maupun tidak langsung. Kelompok jasa keuangan berperan menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Institusi ini tidak memproduksi output secara fisik sehingga mereka biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi.

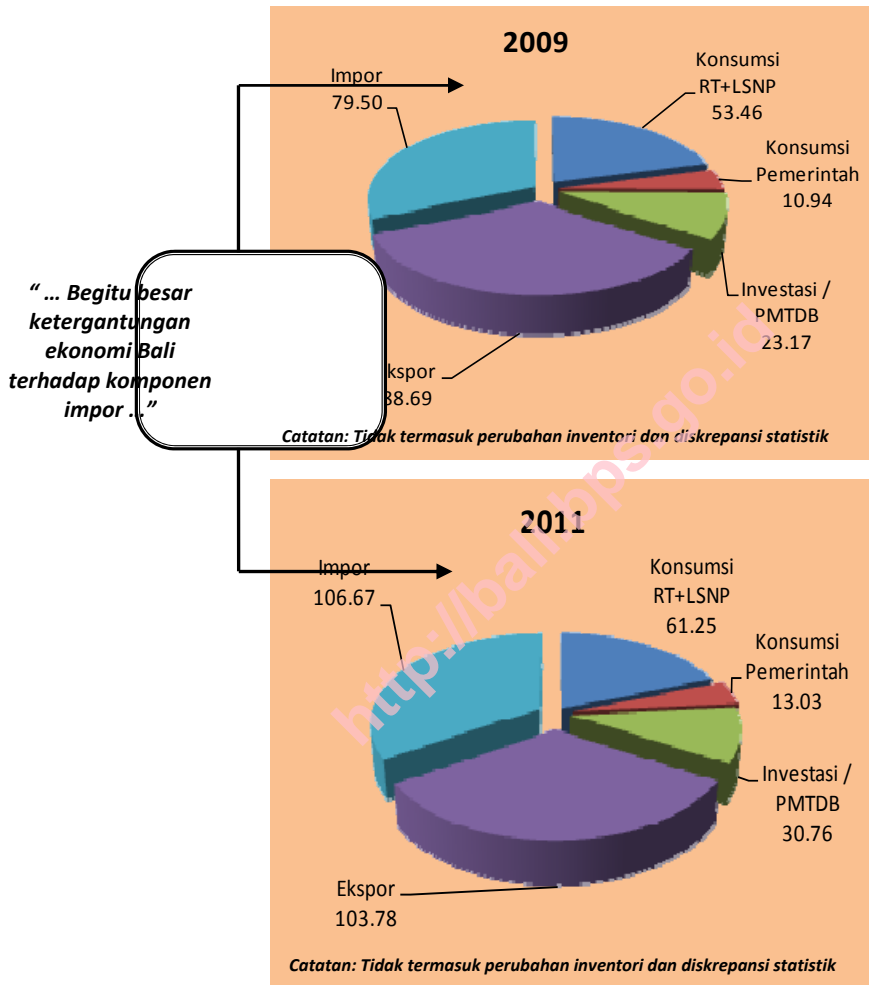
Selanjutnya, meningkatnya ketergantungan antar daerah/negara karena dampak globalisasi, perlunya arus investasi dari luar. Arus modal ini berperan menutup kekurangan tabungan domestik untuk pembiayaan investasi dan belanja konsumsi yang diperlukan penduduk. Peran kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani antara penabung dan peminjam. Penabung

bisa berasal dari rumahtangga, korporasi, pihak asing dan badan-badan lainnya yang melayani publik. Adapun kelompok luar daerah/luar negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal transaksi ekspor dan impor baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan luar negeri.

Dalam kaitan itu, stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan pasar merupakan prasyarat untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Di tengah pemulihan ekonomi global yang masih dibayang-bayangi oleh sejumlah ketidakpastian, ekonomi Bali mampu tumbuh sebesar 6,49 persen sepanjang tahun 2011. Dan ekonomi Bali pun mengalami percepatan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dan angka pertumbuhan ekonomi Bali sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,46 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah ketergantungan Bali akan barang-barang impor, di mana kontribusi komponen impor ini terbilang cukup tinggi (106,67%) terhadap PDRB Bali di tahun 2011. Bahkan angka ini masih jauh di atas kondisi tahun 2009 sebesar 79,50 persen (**lihat Gambar 4.1**).

**GAMBAR 4.1.**  
Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen  
Penggunaan Tahun 2009 dan 2011 (dalam persen)



Lebih jauh akan dipaparkan tinjauan ekonomi Provinsi Bali menurut PDRB penggunaan/pengeluaran (*demand side*) selama periode tahun 2009 – 2011 dalam ulasan singkat berikut ini.

#### 4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit)

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumahtangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumahtangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara, pengeluaran konsumsi sekitar 60 - 75 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang kedua, konsumsi rumahtangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya (Sukirno, 2003:338).

Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Perbandingan besarnya pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan adalah hasrat marjinal untuk berkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume/MPC*). Sedangkan besarnya tambahan pendapatan dinamakan hasrat marjinal untuk menabung (*Marginal to Save/MPS*).

Pada pengeluaran konsumsi rumahtangga terdapat konsumsi minimum bagi rumahtangga tersebut, yakni besarnya pengeluaran konsumsi yang harus dilakukan, walaupun tidak ada pendapatan. Pengeluaran konsumsi rumahtangga ini disebut pengeluaran konsumsi otonom (*outonomous consumption*). Keputusan rumahtangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



Keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka panjang karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada konteks lain, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan terbesar yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya tabungan (*saving*).

Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan *saving* akan bertambah besar dengan pesatnya. Kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai terpenuhi kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah dilewati, maka tambahan pendapatan akan banyak yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan di lain pihak bertambahnya *saving* tidak begitu cepat (Reksoprayitno, 2000).

Dalam konteks Bali, perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran konsumsi masyarakat (konsumsi rumahtangga dan konsumsi lembaga swasta nirlaba) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 2009, pencapaian nilai PDRB harga berlaku untuk pengeluaran konsumsi masyarakat baru senilai Rp 32,23 triliun, namun di tahun

2011 telah mencapai Rp 45,01 trilyun. Dengan demikian, selama periode tahun 2009 – 2011, rata-rata PDRB harga berlaku untuk komponen pengeluaran konsumsi masyarakat senilai Rp 39,02 trilyun.

Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk komponen pengeluaran ini juga cenderung meningkat, kendati nilainya relatif lebih kecil dari PDRB harga berlaku. Pada tahun 2009, nilai PDRB harga konstan untuk pengeluaran konsumsi masyarakat ini mencapai Rp 16,01 trilyun. Nilai ini kemudian meningkat menjadi Rp 18,88 trilyun pada tahun 2011. Secara rata-rata selama periode tahun 2009 – 2011, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan pada komponen pengeluaran ini mencapai Rp 17,49 trilyun. Selengkapnya dapat disimak pada **Tabel 4.1** dan **Tabel 4.2**.

TABEL 4.1.  
PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Masyarakat Tahun 2009-2011  
(dalam Juta Rupiah)

Komponen Konsumsi	2009	2010	2011	Rata-Rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Rumah Tangga	31.463.086,94	39.250.824,25	44.398.064,62	38.370.658,60
1.1. Makanan	14.030.264,05	18.838.599,82	20.627.206,90	17.832.023,59
1.2. Non Makanan	17.432.822,89	20.412.224,43	23.770.857,72	20.538.635,01
2. Lembaga Swasta Nirlaba	767.490,95	556.818,81	609.719,31	644.676,36
<b>Konsumsi Masyarakat</b>	<b>32.230.577,89</b>	<b>39.807.643,06</b>	<b>45.007.783,93</b>	<b>39.015.334,96</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

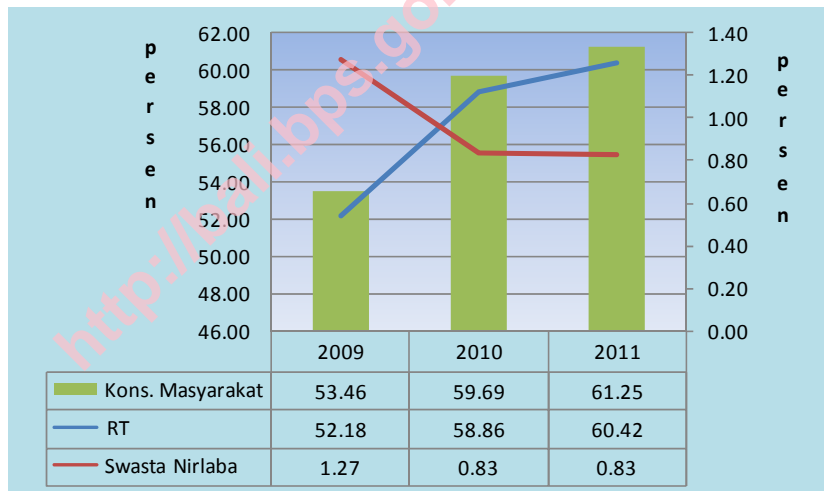
TABEL 4.2.  
PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Masyarakat Tahun 2009-2011  
(dalam Juta Rupiah)

Komponen Konsumsi	2009	2010	2011	Rata-Rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Rumah Tangga	15.751.653,39	17.309.034,78	18.580.391,34	17.213.693,17
1.1. Makanan	7.646.326,59	7.970.401,91	8.329.926,30	7.982.218,26
1.2. Non Makanan	8.105.326,80	9.338.632,87	10.250.465,04	9.231.474,90
2. Lembaga Swasta Nirlaba	261.327,20	278.625,28	299.713,98	279.888,82
<b>Konsumsi Masyarakat</b>	<b>16.012.980,59</b>	<b>17.587.660,05</b>	<b>18.880.105,31</b>	<b>17.493.581,98</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Sementara itu, kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat di Bali telah mencapai angka 61,25 persen terhadap PDRB Bali, terdiri dari konsumsi rumahtangga (60,42%) dan konsumsi lembaga swasta nirlaba (0,83%) di tahun 2011. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 59,69 persen (**lihat Gambar 4.2**).

**GAMBAR 4.2.**  
**Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen**  
**Penggunaan Konsumsi Masyarakat Tahun 2009 – 2011 (dalam persen)**



Sumber: BPS Provinsi Bali

Kuat dugaan meningkatnya kontribusi konsumsi masyarakat dalam setahun terakhir ini terkait dengan beberapa faktor, antara lain dorongan permintaan domestik maupun luar negeri, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kontribusi ekspor terhadap PDRB, dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dampak dari nilai rupiah yang menarik serta derasnya arus

modal masuk telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2011 dengan rata-rata Rp 8.807,6 per dolar AS, menguat 2,55 persen jika dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya.

Pada kondisi jangka pendek dan jangka panjang, ketika perekonomian Bali mengalami pertumbuhan yang meningkat, maka hal tersebut berdampak pada kenaikan nilai nominal PDRB (pendapatan Provinsi Bali), yang pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berkonsumsi. Nilai nominal PDRB maupun pendapatan per kapita masyarakat yang semakin meningkat, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi masyarakat, dan sebaliknya.

Pada sisi lain, pergerakan inflasi di Bali yang mencapai 3,75 persen di tahun 2011 atau lebih rendah dari inflasi tahun 2010 sebesar 8,10 persen, dan hal ini mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi masyarakat menjadi semakin besar. Hal ini karena masyarakat telah menyesuaikan hasrat berkonsumsi menurut pendapatannya.

Secara umum, ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat inflasi yang mempengaruhi masyarakat, antara lain, **Pertama**, Inflasi sangat merugikan bagi masyarakat berpenghasilan tetap karena harga-harga barang dan jasa melambung tinggi, sedangkan gaji mereka tidak naik. Maka inflasi menyebabkan pendapatan riil seseorang terlihat rendah, karena dengan gaji yang diterima barang atau jasa yang mereka peroleh lebih sedikit

dibandingkan sebelum terjadinya inflasi. **Kedua**, Inflasi tidak akan berpengaruh banyak pada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap karena pendapatan mereka didasarkan pada keuntungan yang didapat dan mereka bisa meminta upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Contohnya: pengacara, pengusaha, buruh, dan lain sebagainya.

**Ketiga**, Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun jika biaya produksinya lebih besar dari pada pendapatan yang diterima, maka produsen tersebut akan dirugikan karena tidak dapat bersaing dengan produk-produk lain.

Bagi industri perbankan, inflasi mempengaruhi sikap masyarakat untuk menabung dikarenakan tingkat bunga yang sama terlihat rendah. Bila masyarakat enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk mengembangkan usaha para pengusaha dan investor membutuhkan dana dari bank yang didapat dari tabungan masyarakat. Sedangkan dampak inflasi bagi orang yang meminjam di bank sangat menguntungkan karena saat pembayaran utang kepada bank nilai uang lebih rendah pada saat meminjam. Dan bagi pihak yang meminjamkan uang (bank), inflasi merugikan sebab nilai pengembalian uang lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman; dan **keempat**, Bagi pemerintah, inflasi yang tinggi akan menyebabkan terjadinya defisit

APBN dan pembayaran bunga serta cicilan utang luar negeri semakin meningkat.

Dengan demikian, selama periode tahun 2009 – 2011, rata-rata kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat di Bali telah mencapai angka 58,13 persen. Dalam periode itu, kontribusi terendah pada komponen pengeluaran ini terjadi di tahun 2009 yang hanya mencapai 53,46 persen (konsumsi rumahtangga 52,18%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba 1,27%).

Secara teori, ekonomi yang digerakkan konsumsi dalam jangka panjang akan mengalami perlambatan, bahkan bisa jadi penurunan karena sebagian besar output atau nilai tambah yang tercipta digunakan untuk konsumsi. Jadi tidak ada atau malah hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk berinvestasi, sehingga pembentukan atau penciptaan output ke depan cenderung tetap atau malah menurun.

#### **4.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah masih memegang peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal, sangat berperan dalam kinerja perekonomian kita. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD diharapkan bisa menjadi stimulus untuk memajukan perekonomian.

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya, apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak. Kebijakan moneter dilakukan dengan mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Pengawasan langsung dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan.

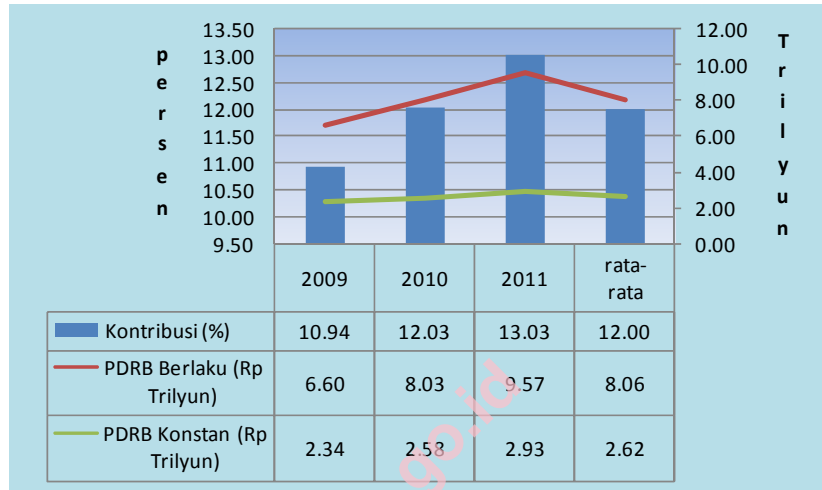
Alasan peranan pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian adalah: (1) untuk menyediakan legal sistem atau peraturan-peraturan yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat; (2) untuk membetulkan bila terjadi kegagalan pasar; (3) peranan pemerintah dalam mendistribusikan



pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin secara lebih adil; dan (4) peranan pemerintah dalam menyediakan barang-barang yang seharusnya disediakan, meskipun masyarakat tidak memintanya. Masyarakat sering tidak bijaksana atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang dimiliki. Peranan pemerintah adalah membantu masyarakat untuk mengalokasikannya untuk kebaikan masyarakat. Contohnya adalah pemerintah menyediakan helm agar masyarakat terhindar dari bahaya manakala terjadi kecelakaan, demikian juga pemerintah menggalakkan asuransi untuk masyarakat.

Secara umum, fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi tiga. **Pertama**, Fungsi alokasi, yakni pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. **Kedua**, Fungsi distribusi, yakni pemerintah mengusahakan distribusi dan pemerataan bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, dan **Ketiga**, fungsi stabilisasi, yakni pemerintah mengusahakan stabilisasi dalam perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta (*private*) sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

**GAMBAR 4.3.**  
**PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen**  
**Penggunaan Konsumsi Pemerintah Tahun 2009 - 2011**



Sumber: BPS Provinsi Bali

Dalam kaitan itu, bila melihat perkembangan PDRB di Bali pada harga berlaku untuk komponen pengeluaran konsumsi pemerintah ini terjadi kenaikan hampir satu setengah kali lipat, seperti dapat dilihat pada **Gambar 4.3**, dari Rp 6,60 trilyun di tahun 2009 menjadi Rp 9,57 trilyun di tahun 2011 atau dengan rata-rata senilai Rp 8,06 trilyun selama periode tahun 2009 – 2011. Sedangkan pada harga konstan, PDRB komponen ini pun bergerak naik, dari Rp 2,34 trilyun di tahun 2009 menjadi Rp 2,93 trilyun di tahun 2011 atau dengan rata-rata senilai Rp 2,62 trilyun dalam periode tersebut. Hal ini secara otomatis akan mendorong meningkatnya belanja barang dan jasa secara rutin, upah, gaji dan penyusutan.

Sekadar gambaran, realisasi APBD Bali pada tahun 2011 untuk komponen belanja daerah mencapai Rp 2,56

trilyun atau sebesar 86,25 persen dari anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp 2,97 trilyun. Belanja daerah di sini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal). Fenomena lain menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, kontribusi yang disumbangkan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah ini terhadap PDRB Bali mencapai pada kisaran angka diatas 10 persen dengan rata-rata sebesar 12 persen pada periode tersebut.

#### **4.3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto**

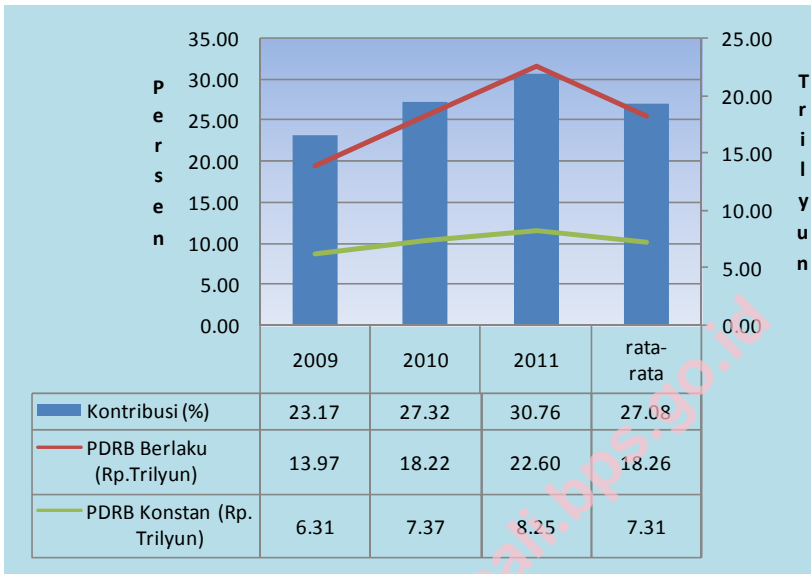
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang lebih dikenal dengan *investasi fisik* merupakan komponen pengeluaran PDRB yang berhubungan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi (*output*) di masa yang akan datang. PMTDB itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam bentuk bangunan/konstruksi, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan. Barang modal tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi, dan biasanya mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Sumberdaya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun dalam memanfaatkan sumberdaya alam perlu memperhatikan kelestarian dan keseimbangan

lingkungan hidup bagi pembangunan. Peranan investasi di Bali cenderung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang di butuhkan untuk melanjutkan pembangunan Bali. Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi/lapangan usaha.

Selama periode tahun 2009 – 2011, perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan untuk komponen PMTDB di Bali cenderung mengalami peningkatan. Pada harga berlaku, pengeluaran PMTDB di tahun 2009 baru senilai Rp 13,97 trilyun, namun kemudian meningkat di tahun 2011 yang mencapai Rp 22,60 trilyun. Peningkatan ini pun terjadi pada harga konstan, di mana di tahun 2009 nilai PDRB komponen pengeluaran ini sebesar Rp 6,31 trilyun, dan lima tahun kemudian di tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp 8,25 trilyun (**lihat Gambar 4.4**). Paling tidak, cerminan peningkatan PDRB pada komponen pengeluaran PMTDB ini menunjukkan di satu sisi, bahwa sejumlah investor mulai yakin akan stabilitas iklim berinvestasi di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**GAMBAR 4.4.**  
**PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan**  
**Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Tahun 2009 – 2011**



Sumber: BPS Provinsi Bali

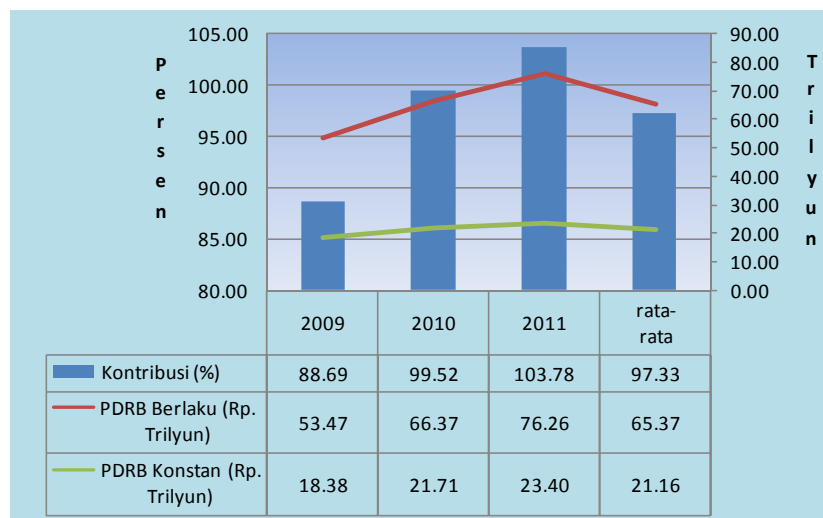
Beragam kebijakan ekonomi daerah dalam upaya peningkatan investasi setidaknya telah membuat kepercayaan investor mulai bergairah. Hal ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, dan diharapkan ke depan kondisi seperti ini masih tetap terjaga dengan baik.

Pada **Gambar 4.4** juga diperlihatkan kontribusi yang disumbangkan komponen pengeluaran PMTDB terhadap PDRB Bali yang menunjukkan siklus peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, kontribusinya baru mencapai 23,17 persen. Namun pada tahun 2011, angkanya telah mencapai 30,76 persen. Dengan demikian, secara rata-rata selama periode tahun 2009 – 2011 kontribusinya sebesar 27,08 persen.

#### 4.4. Ekspor – Impor Barang dan Jasa

Kemampuan ekspor – impor barang dan jasa, baik antar negara maupun antar provinsi, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan penciptaan nilai tambah (*value added*). Apalagi kegiatan ekspor – impor itu sendiri memiliki efek ganda (*multiplier effect*), yakni sebagai masukan bagi penerimaan devisa daerah (berupa ekspor) maupun sebagai bagian *supply* barang dan jasa (berupa impor) dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik. Di samping itu, dinamika perekonomian global dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan kinerja ekspor-impor Provinsi Bali selama tahun 2009-2011.

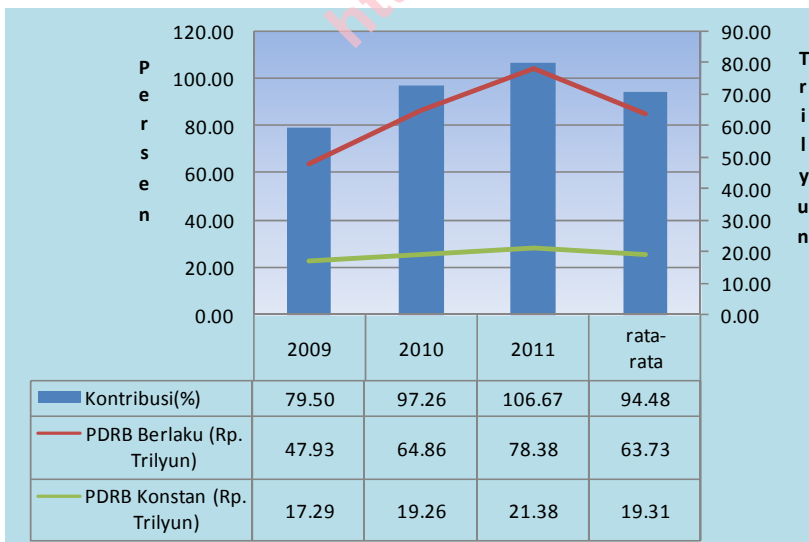
**GAMBAR 4.5.**  
**PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Ekspor**  
**Tahun 2009 – 2011**



Sumber: BPS Provinsi Bali

Dalam kaitan itu, perkembangan PDRB untuk komponen ekspor-impor barang dan jasa di Bali selama periode tahun 2009 – 2011 malah cenderung meningkat, seperti dapat dilihat pada **Gambar 4.5**. Pada harga berlaku, nilai PDRB komponen ekspor mengalami peningkatan, dari Rp 53,47 trilyun di tahun 2009 menjadi Rp 76,26 trilyun di tahun 2011. Sedangkan dari sisi impor juga menunjukkan hal yang sama, seperti tampak pada **Gambar 4.6**. Di tahun 2009, nilai PDRB pada harga berlaku komponen impor ini baru mencapai Rp 47,93 trilyun, namun di tahun 2011 telah meningkat hingga mencapai Rp 78,38 trilyun. Rata-rata PDRB komponen impor ini selama periode 2009 – 2011 mencapai Rp 63,73 trilyun.

**GAMBAR 4.6.**  
**PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Impor Tahun 2009 – 2011**



Sumber: BPS Provinsi Bali

Selisih antara ekspor dengan impor (*net ekspor*) pada tahun 2011 mencapai defisit yaitu minus Rp 2,12 triliun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai surplus sebesar Rp 1,50 triliun. Sementara itu, fenomena perkembangan nilai PDRB komponen ekspor – impor pada harga konstan juga menunjukkan kecenderungan kenaikan, kendati angkanya relatif lebih rendah dari PDRB atas dasar harga berlaku (**lihat Gambar 4.5 dan Gambar 4.6**).

Bila dilihat dari kontribusinya, komponen ekspor – impor terhadap PDRB Bali merupakan yang paling tinggi. Pada tahun 2009, kontribusi ekspor baru mencapai 88,69 persen dan impor mencapai 79,50 persen. Namun kondisi ini terus meningkat di tahun 2011 yang mencapai 103,78 persen (ekspor) dan 106,67 persen (impor). Terlihat bahwa rata-rata pergerakan kontribusi ekspor lebih tinggi daripada impor selama tiga tahun terakhir terkecuali pada tahun 2011 kontribusi impor lebih tinggi dibandingkan ekspor.

#### **4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran/Penggunaan**

PDRB Provinsi Bali atas dasar harga berlaku di tahun 2011 telah mencapai Rp 73,48 triliun atau meningkat 10,18 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 66,69 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan juga terjadi kenaikan, dari Rp 28,88 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 30,75 triliun di tahun 2011. Selama tahun 2011, perekonomian Bali mampu tumbuh sebesar 6,49 persen.



Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2011 ditandai dengan paling tingginya laju pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah dan investasi (PMTDB). Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2011 mencapai 13,79 persen (*year on year*), dan laju pertumbuhan investasi (PMTDB) mencapai 11,83 persen. Selain menjadi komponen yang paling tinggi mencapai laju pertumbuhan di tahun 2011, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10,01 persen.

**TABEL 4.3.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut**  
**Komponen Penggunaan Tahun 2009 – 2011 (dalam persen)**

Komponen	2009	2010	2011	Rata-Rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Konsumsi Rumah Tangga	18,38	9,89	7,35	<b>11,87</b>
2. Konsumsi Swasta Nirlaba	14,85	6,62	7,57	<b>9,68</b>
3. Konsumsi Pemerintah	10,44	10,01	13,79	<b>11,41</b>
4. PMTDB	7,93	16,92	11,83	<b>12,23</b>
5. Perubahan Stok/Inventori	13,38	2,49	7,02	<b>7,63</b>
6. Ekspor	11,46	18,08	7,81	<b>12,45</b>
7. Impor	18,84	11,39	10,97	<b>13,73</b>
<b>PDRB</b>	<b>5,33</b>	<b>5,83</b>	<b>6,49</b>	<b>5,88</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali

Sementara itu, laju pertumbuhan investasi (PMTDB), walaupun pada tahun 2011 adalah laju pertumbuhan tertinggi kedua setelah konsumsi pemerintah, tetapi komponen PMTDB mengalami perlambatan jika dibandingkan dari tahun 2010 yang sebesar 16,92 persen.

Komponen yang juga cukup tinggi mengalami pertumbuhan adalah impor, walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen impor sebesar 10,97 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,39 persen. Dan diluar komponen pengeluaran pemerintah, PMTDB, dan impor, laju pertumbuhannya di tahun 2011 berada dibawah 8 persen. Selengkapnya dapat disimak pada **Tabel 4.3**.

<http://bali.bps.go.id>



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://balliops.go.id>

# **Bab V**

## **P E N U T U P**

<http://bali.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

Pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, terutama di negara-negara *emerging countries*, dan terjaganya stabilitas perekonomian telah memberikan dampak positif bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan telah memberikan kontribusi bagi terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal dalam perekonomian domestik. Hal tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan berkualitas.

Ekonomi Bali tumbuh 6,49 persen sepanjang tahun 2011. Kendati pertumbuhan ekonomi Bali dapat dicapai 6,49 persen selama tahun 2011 atau melewati dari angka target yang ditetapkan dalam KUA Bali 2011 sebesar 6,36 persen, dan laju pertumbuhan ini hampir sama dengan angka nasional yang mencapai 6,50 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2011 ditandai dengan paling tingginya laju pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah dan investasi (PMTDB). Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2011 mencapai 13,79 persen (*year on year*), dan laju pertumbuhan investasi (PMTDB) mencapai 11,83 persen.

Dalam kaitan itu, satu hal terpenting adalah bagaimana mengelola perekonomian Bali itu sendiri yang sangat tergantung dari sejauh mana ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan dan dinamika ekonomi yang terjadi dalam lingkup global, nasional maupun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Agustus.
- Anonim. 2008. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2009*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 15 September.
- Anonim. 2009. *Bali Dalam Angka 2009*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Anonim. 2009. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2009. *Berita Resmi Statistik Provinsi Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2009. *Indonesia Economic Outlook 2010*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Anonim. 2009. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2010*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 12 Nopember 2009.
- Anonim. 2009. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2009*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Anonim. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 28 April 2009.
- Anonim. 2010. *Bahan presentasi (slide) "Pembangunan Perekonomian Bali yang berkeadilan dalam Memperkuat Triple Track Strategy*, disampaikan dalam rangka rapat evaluasi pembangunan ekonomi Bali. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali – Tim Makro Ekonomi Bali.

- Anonim. 2010. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2010. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Juli.
- Anonim. 2010. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Anonim. 2010. *Optimalisasi Sinergi: Meningkatkan Koordinasi Seluruh Stakeholders Ekonomi Bali*, dalam seminar "Perekonomian Bali Semester I-2010". Denpasar: Bank Indonesia Denpasar, Agustus.
- Anonim. 2010. *Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUR RI ke-65 di depan sidang bersama DPR dan DPRD RI, 16 Agustus 2010*. Available from URL: <http://rotanindonesia.org>, di akses 5 Oktober 2010.
- Anonim. 2011. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan BPS RI, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2011. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2011*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 14 Januari.
- Anonim. 2011. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- P.Saliem dan Ariningsih. 2008. *Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah tangga di Perdesaan: Analisis Data Susenas 1999 – 2005*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Desember. Available from URL: [http://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/MSU\\_1.pdf](http://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/MSU_1.pdf), di akses 19 Oktober 2010.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Reksoprayitno, Soediyono. 2000. *Ekonomi Makro (Pengantar Analisis Pendapatan Nasional) Edisi Kelima, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Liberty.



<http://bali.bps.go.id>

# LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://bali.bps.go.id>

TABEL 1.  
 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000 TAHUN 2009-2011  
 (DALAM JUTA RUPIAH)

Komponen	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]
ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>31.463.086,94</b>	<b>39.250.824,25</b>	<b>44.398.064,62</b>
1.1. Makanan	14.030.264,05	18.838.599,82	20.627.206,90
1.2. Non Makanan	17.432.822,89	20.412.224,43	23.770.857,72
<b>2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba</b>	<b>767.490,95</b>	<b>556.818,81</b>	<b>609.719,31</b>
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>6.595.587,52</b>	<b>8.025.003,70</b>	<b>9.574.390,80</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</b>	<b>13.971.712,71</b>	<b>18.220.244,59</b>	<b>22.598.442,17</b>
<b>5. a. Perubahan Inventori</b>	<b>199.081,71</b>	<b>219.073,36</b>	<b>254.254,01</b>
b. Diskrepansi Statistik	1.757.261,03	-1.084.889,52	-1.832.730,57
<b>6. Ekspor</b>	<b>53.472.946,16</b>	<b>66.368.495,46</b>	<b>76.258.002,42</b>
a. Antar Negara	38.061.073,24	45.936.500,04	49.165.770,17
b. Antar Provinsi	15.411.873,23	20.431.995,41	27.092.232,25
<b>7. Impor</b>	<b>47.934.928,00</b>	<b>64.864.972,51</b>	<b>78.381.980,88</b>
a. Antar Negara	29.709.855,34	37.270.906,95	41.847.498,68
b. Antar Provinsi	18.225.072,66	27.594.065,57	36.534.482,21
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>60.292.239,32</b>	<b>66.690.598,13</b>	<b>73.478.161,87</b>
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>15.751.653,39</b>	<b>17.309.034,78</b>	<b>18.580.391,34</b>
1.1. Makanan	7.646.326,59	7.970.401,91	8.329.926,30
1.2. Non Makanan	8.105.326,80	9.338.632,87	10.250.465,04
<b>2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba</b>	<b>261.327,20</b>	<b>278.625,28</b>	<b>299.713,98</b>
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>2.342.381,10</b>	<b>2.576.931,50</b>	<b>2.932.170,86</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</b>	<b>6.307.720,70</b>	<b>7.374.879,29</b>	<b>8.247.368,71</b>
<b>5. a. Perubahan Inventori</b>	<b>79.441,05</b>	<b>81.419,35</b>	<b>87.135,05</b>
b. Diskrepansi Statistik	1.459.559,87	-1.182.573,22	-1.419.010,10
<b>6. Ekspor</b>	<b>18.383.153,04</b>	<b>21.706.908,79</b>	<b>23.403.189,87</b>
a. Antar Negara	13.350.168,03	15.913.447,93	16.528.171,12
b. Antar Provinsi	5.032.985,01	5.793.460,86	6.875.018,74
<b>7. Impor</b>	<b>17.294.290,74</b>	<b>19.264.539,56</b>	<b>21.377.285,64</b>
a. Antar Negara	8.223.296,93	8.675.212,28	9.081.022,90
b. Antar Provinsi	9.070.993,81	10.589.327,27	12.316.262,75
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>27.290.945,61</b>	<b>28.880.686,20</b>	<b>30.753.674,05</b>

TABEL 2.  
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN  
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000 TAHUN 2009-2011

Komponen	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>52,18</b>	<b>58,86</b>	<b>60,42</b>
1.1. Makanan	23,27	28,25	28,07
1.2. Non Makanan	28,91	30,61	32,35
<b>2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba</b>	<b>1,27</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>10,94</b>	<b>12,03</b>	<b>13,03</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</b>	<b>23,17</b>	<b>27,32</b>	<b>30,76</b>
<b>5. a. Perubahan Inventori</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>
<b>b. Diskrepansi Statistik</b>	<b>2,91</b>	<b>-1,63</b>	<b>-2,49</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>88,69</b>	<b>90,52</b>	<b>103,78</b>
a. Antar Negara	63,13	68,88	66,91
b. Antar Provinsi	25,56	30,64	36,87
<b>7. Impor</b>	<b>79,50</b>	<b>97,26</b>	<b>106,67</b>
a. Antar Negara	49,28	55,89	56,95
b. Antar Provinsi	30,23	41,38	49,72
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>57,72</b>	<b>59,93</b>	<b>60,42</b>
1.1. Makanan	28,02	27,60	27,09
1.2. Non Makanan	29,70	32,34	33,33
<b>2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>8,58</b>	<b>8,92</b>	<b>9,53</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</b>	<b>23,11</b>	<b>25,54</b>	<b>26,82</b>
<b>5. a. Perubahan Inventori</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>b. Diskrepansi Statistik</b>	<b>5,35</b>	<b>-4,09</b>	<b>-4,61</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>67,36</b>	<b>75,16</b>	<b>76,10</b>
a. Antar Negara	48,92	55,10	53,74
b. Antar Provinsi	18,44	20,06	22,36
<b>7. Impor</b>	<b>63,37</b>	<b>66,70</b>	<b>69,51</b>
a. Antar Negara	30,13	30,04	29,46
b. Antar Provinsi	33,24	36,67	40,05
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

TABEL 3.  
 INDEKS IMPLISIT PDRB PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN  
 TAHUN 2009-2011

Komponen	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>199,74</b>	<b>226,76</b>	<b>238,96</b>
1.1. Makanan	163,49	236,36	247,63
1.2. Non Makanan	215,08	218,58	231,90
<b>2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba</b>	<b>293,69</b>	<b>199,85</b>	<b>203,43</b>
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>281,58</b>	<b>311,42</b>	<b>326,53</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</b>	<b>221,57</b>	<b>247,06</b>	<b>274,01</b>
<b>5. a. Perubahan Inventori</b>	<b>250,60</b>	<b>269,07</b>	<b>291,79</b>
b. Diskrepansi Statistik	120,40	91,74	129,16
<b>6. Ekspor</b>	<b>290,88</b>	<b>305,75</b>	<b>325,84</b>
a. Antar Negara	265,10	288,66	297,47
b. Antar Provinsi	306,22	352,67	394,07
<b>7. Impor</b>	<b>277,17</b>	<b>336,71</b>	<b>366,66</b>
a. Antar Negara	361,29	429,63	461,84
b. Antar Provinsi	200,92	260,58	296,64
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>220,92</b>	<b>230,92</b>	<b>238,92</b>

TABEL 4.  
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN  
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000 TAHUN 2009-2011

Komponen	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>18,38</b>	<b>9,89</b>	<b>7,35</b>
1.1. Makanan	20,36	4,24	4,51
1.2. Non Makanan	16,57	15,22	9,76
<b>2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba</b>	<b>14,85</b>	<b>6,62</b>	<b>7,57</b>
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>10,44</b>	<b>10,01</b>	<b>13,79</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</b>	<b>7,93</b>	<b>16,92</b>	<b>11,83</b>
<b>5. a. Perubahan Inventori</b>	<b>13,38</b>	<b>2,49</b>	<b>7,02</b>
b. Diskrepansi Statistik	-39,21	-181,02	19,99
<b>6. Ekspor</b>	<b>11,16</b>	<b>18,08</b>	<b>7,81</b>
a. Antar Negara	7,39	19,20	3,86
b. Antar Provinsi	23,90	15,11	18,67
<b>7. Impor</b>	<b>18,84</b>	<b>11,39</b>	<b>10,97</b>
a. Antar Negara	27,10	5,50	4,45
b. Antar Provinsi	12,22	16,74	16,31
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,33</b>	<b>5,83</b>	<b>6,49</b>

# DATA

## Mencerdaskan Bangsa

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan (Renon), Telepon: (0361) 238159, 243162, Denpasar 80226  
Fax: (0361) 238162, E-Mail: [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)